

PT KDB Tifa Finance Tbk

Laporan Keuangan

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021 (tidak diaudit) dan 30 September 2020 (tidak diaudit)

dan

Posisi Keuangan per 30 September 2021 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2020 (diaudit)

PT KDB TIFA FINANCE Tbk DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT KDB Tifa Finance Tbk untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021 dan 2020 serta Posisi Keuangan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

LAPORAN KEUANGAN - Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021 dan 2020

Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi Komprehensif	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6



Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Phone : (62-21) 5094 1140 www.kdbtifa.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
SERTA POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Kim Kang Soo

Alamat Kantor

: Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9

Jakarta 12190

Nomor Telepon

: 021-50941140

Jabatan

: Presiden Direktur

2. Nama

: Ester Gunawan

Alamat Kantor

: Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9

Jakarta 12190

Nomor Telepon

: 021-50941140

Jabatan

: Direktur

menyatakan bahwa:

- 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021 dan 2020 serta posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020.
- 2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

27 Oktober 2021

Kim Kang Soo Presiden Direktur Ester Gunawan Direktur

PT KDB TIFA FINANCE Tbk Laporan Posisi Keuangan 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kas dan Setara Kas dan Penempatan di Bank Piutang Sewa Pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 28.082.919 dan Rp 40.050.587 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 5 Piutang Pembiayaan Multiguna - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 312.168 dan Rp 893.217 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 6 Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga 7 Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.521 dan Rp 2.429.302 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 8 Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 9 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Jjarah Muntahiyah Bittamlik Aset Jjarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih Pihak berelasi	Tidak diaudit 30 September 2021	Diaudit 31 Desember 2020
Piutang Sewa Pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 28.082.919 dan Rp 40.050.587 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 5 Piutang Pembiayaan Multiguna - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 312.168 dan Rp 893.217 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 6 Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga 7 Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.521 dan Rp 2.429.302 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 8 Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 9 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12		
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 28.082.919 dan Rp 40.050.587 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 5 Piutang Pembiayaan Multiguna - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 312.168 dan Rp 893.217 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 6 Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga 7 Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.521 dan Rp 2.429.302 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 8 Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 9 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Jiarah Muntahiyah Bittamlik setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih	537,813,214	252,940,291
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 312.168 dan Rp 893.217 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 6 Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga 7 Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.521 dan Rp 2.429.302 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 8 Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 9 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12	665,974,587	659,867,738
Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga 7 Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.521 dan Rp 2.429.302 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 8 Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 9 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12		
Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.521 dan Rp 2.429.302 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 8 Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 9 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12	21,812,046	5,464,291
akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.866.521 dan Rp 2.429.302 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih	952,839	2,523,251
akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.257.197 dan Rp 13.936.811 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 9 Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12	9,494,661	9,931,880
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12	19,193,021	6,601,379
setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 105.940.967 dan Rp 192.553.392 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 10 Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12	6,902,803	7,132,641
Aset Pengampunan Pajak 11 Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12	59,398,875	138,933,429
Biaya dibayar Di Muka Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12		
Aset Pajak Tangguhan 28 Aset Lain-lain - Bersih 12	1,000,000	1,000,000
Aset Lain-lain - Bersih 12	1,558,982	267,838
	86,201	90,718
Pihak ketiga Jumlah JUMLAH ASET	120,483,926 120,483,926 1,444,671,155	178,128 18,884,383 19,062,511 1,103,815,967

PT KDB TIFA FINANCE Tbk Laporan Posisi Keuangan 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Tidak diaudit 30 September 2021	Diaudit 31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Surat Utang Jangka Menengah	13	-	35,246,859
Utang Pajak	14	2,824,662	6,130,898
Pinjaman yang Diterima	15	340,878,469	563,668,401
Liabilitas Sewa	16	10,197,434	227,156
Beban Akrual	17	2,145,597	1,568,956
Uang Muka Pelanggan	18	40,585,954	50,573,864
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	27	490,823	391,823
Liabilitias pajak tangguhan	28	3,803	-
Liabilitas Lain-lain	19	24,736,756	80,812,415
Jumlah Liabilitas		421,863,498	738,620,372
EKUITAS			
Modal Saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 4.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 3.552.213.000 saham dan 1.079.700.000 pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020	21	355,221,300	107,970,000
Tambahan Modal Disetor - Bersih	22	404,732,678	10,830,922
Saldo Laba Cadangan umum Belum ditentukan penggunaannya	29	500,000 262,353,679	450,000 245,944,673
Jumlah Ekuitas		1,022,807,657	365,195,595
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,444,671,155	1,103,815,967

PT KDB TIFA FINANCE Tbk Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021 dan 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	_ Catatan_	Tidak diaudit 30 September 2021	Tidak diaudit 30 September 2020
PENDAPATAN			
Sewa pembiayaan	5	69,429,117	104,983,554
Pembiayaan multiguna Keuntungan penjualan aset tetap dan	6	1,452,148	1,448,901
aset untuk disewakan	8.9	127,637	(68,069)
Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik - bersih	10	7,602,040	- 11,879,336
Bunga dan bagi hasil	23	1,246,365	637,626
Lain-lain	24	2,797,912	939,943
Jumlah Pendapatan		82,655,219	119,821,291
BEBAN			
Beban bunga dan bagi hasil	25	19,592,876	49,808,349
Beban umum dan administrasi	26	37,780,089	33,248,204
Pembentukan cadangan kerugian			
penurunan nilai - bersih	5,6,10,12	2,280,490	14,436,813
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih		713,269	(155,901)
Lain-lain		1,061,414	(133,901)
		.,00.,	
Jumlah Beban		61,428,138	97,337,465
LABA SEBELUM PAJAK		21,227,081	22,483,826
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	28		
Kini		4,759,755	2,527,755
Tangguhan		8,320	
		4,768,075	2,527,755
LABA TAHUN BERJALAN		16,459,006	19,956,071
RUGI KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti Pajak sehubungan dengan pos yang tidak	27	-	-
akan direklasifikasi	28	<u> </u>	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		16,459,006	19,956,071
LABA PER SAHAM			
DASAR (dalam Rupiah penuh)	30	12.15	18.48

PT KDB TIFA FINANCE Tbk Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021, serta Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

			Tambahan	Saldo Laba/Ret	ained Earnings	
	Catatan	Modal Saham Modal ditempatkan dan disetor	Modal Disetor	Cadangan Umum	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 - sebelum dampak penyesuaian		107,970,000	10,830,922	400,000	251,508,643	370,709,565
Penyesuaian dampak penerapan: PSAK No.71	38				(20,460,492)	(20,460,492)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 - setelah dampak penyesuaian		107,970,000	10,830,922	400,000	231,048,151	350,249,073
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan		-	-	-	14,885,370	14,885,370
Rugi komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih	27	<u>-</u> _	<u>-</u> _		61,152	61,152
Jumlah penghasilan komprehensif					14,946,522	14,946,522
Pembentukan cadangan umum	29			50,000	(50,000)	<u>-</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		107,970,000	10,830,922	450,000	245,944,673	365,195,595
Penerbitan saham baru Penambahan saham Biaya emisi saham		247,251,300	395,602,080 (1,700,324)	-	-	642,853,380 (1,700,324)
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan Rugi komprehensif lain		-	-	-	16,459,006	16,459,006
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - bersih Jumlah penghasilan komprehensif		<u> </u>	<u>-</u>	<u>-</u>	16,459,006	16,459,006
Pembentukan cadangan umum				50,000	(50,000)	<u>-</u>
Saldo pada tanggal 30 September 2021		355,221,300	404,732,678	500,000	262,353,679	1,022,807,657

PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Laporan Arus Kas

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021 dan 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	30 September 2021	30 September 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Sewa pembiayaan	395,347,252	484,398,428
Pembiayaan multiguna	7,283,085	8,871,449
Tagihan anjak piutang	20 600 220	1,491,400
ljarah muntahiyah bittamlik	20,608,238	45,060,023
Penerimaan premi asuransi Pendapatan bunga	3,048,539	6,833,651
Piutang yang diambil-alih	1,307,072 8,386,599	637,039 2,374,652
Pendapatan lain-lain	2,869,294	452,490
Jumlah penerimaan kas	438,850,079	550,119,132
Pengeluaran kas untuk:		
Sewa pembiayaan	(343,740,045)	(181,742,904)
Pembiayaan multiguna	(25,185,567)	(4,934,089)
ljarah muntahiyah bittamlik	(16,010,285)	(13,280,382)
Beban keuangan	(19,840,922)	(50,248,897)
Beban usaha	(37,400,927)	(33,804,615)
Premi asuransi	(10,032,007)	(8,504,041)
Beban lain-lain	(1,850,427)	(9,253,163)
Jumlah pengeluaran kas	(454,060,180)	(301,768,091)
Kas diperoleh dari operasi	(15,210,101)	248,351,041
Pembayaran pajak penghasilan	(8,422,677)	(5,949,367)
Kas Bersih (Digunakan untuk) /		
Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(23,632,778)	242,401,674
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	176,500	85,550
Penarikan investasi lainnya	2,726,794	=
Perolehan investasi lainnya	(70,181,483)	-
Perolehan aset tetap	(4,880,685)	(4,438,423)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(72,158,874)	(4,352,873)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari pencairan pinjaman	204,919,426	152,129,998
Penerimaan dari Penerbitan Modal Saham	642,853,380	132,129,990
Pembayaran pinjaman	(432,205,048)	(335,839,101)
Pembayaran surat utang jangka menengah	(35,147,416)	(35,877,529)
	(00,111,110)	(00,011,020)
Kas Bersih Diperoleh dari / (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	380,420,342	(219,586,632)
VENAUVAN (PENUDUNAN) PERCULATA		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	284,628,690	18,462,169
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	137,549,931	12,166,479
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	1,173,586	(3,764)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	423,352,207	30,624,884

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perusahaan"), didirikan dengan nama PT Tifa Mutual Finance Corporation berdasarkan Akta No. 42 tanggal 14 Juni 1989 dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6585.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Juli 1989, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990, dan diumumkan dalam Tambahan No. 2257 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 1991.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 16 Agustus 2000 dari Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta, nama Perusahaan berubah dari PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-6276.HT.01. 04.TH.2001 tanggal 27 April 2001.

Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 9 September 2020 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, nama Perusahaan berubah dari PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0384367 tanggal 9 September 2020.

Berdasarkan Akta No. 196 tanggal 24 September 2021 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peningkatan modal ditempatkan/disetor dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0453439 tanggal 27 September 2021.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan Nomor KEP-076/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan dalam bidang perusahaan pembiayaan investasi, pembiayaan syariah, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Equity Tower It.39, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta yang juga merupakan Kantor Pusat Operasional. Perusahaan memiliki kantor cabang di Surabaya, dan kantor perwakilan di Semarang, Balikpapan, Makasar dan Pekanbaru.

Pemegang saham akhir Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Pemerintah Republik Korea.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 30 Juni 2011, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/Bapepam dan LK) atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-7296 untuk penawaran umum perdana atas 278.000.000 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 per saham (dalam Rupiah penuh) pada harga penawaran Rp 200 per saham (dalam Rupiah penuh) yang terdiri dari sebanyak 55.800.000 saham baru yang berasal dari portepel Perusahaan dan sebanyak 222.200 saham atas nama Pemegang Saham yang terdiri dari sejumlah 115.544.000 saham atas nama PT Dwi Satrya Utama dan 106.656.000 saham atas nama Tan Chong Credit Pte. Ltd. Saham-saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2011.

Pada tanggal 26 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melaui surat No. S-144/D.04/2021 untuk Penawaran Umum Terbatas I atas 2.472.513.000 lembar saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 per saham (dalam Rupiah penuh) pada harga penawaran Rp 260 per saham (dalam Rupiah penuh) yang semuanya berasal dari portepel Perusahaan. Saham-saham Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 24 September 2021.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, seluruh saham Perusahaan atau sejumlah masing-masing sebesar 3.552.213.000 dan 1.079.700.000 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

c. Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris

Pada tanggal 30 September 2021, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Akta No. 90 tanggal 23 Februari 2021 dan Akta No. 98 tanggal 15 Maret 2021 dari Christina Dwi Utami, S.H., MHum, MKn, notaris di Jakarta, dan susunan pengurus Perusaahaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<u>30 September 2021</u> <u>31 Desember 2020</u>

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hwang Kilseog Lisjanto Tjiptobiantoro Komisaris : Sim Jae Poong Sng Chiew Huat

Komisaris Independen : Choi Jung Sik Fransiskus Xaverius Bagus Ekodanto

Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala Antonius Hanifah Komala

Direktur

Presiden Direktur : Kim Kang Soo Bernard Thien Ted Nam

Direktur : Ester Gunawan Tjahja Wibisono Direktur : Kim Kyung Woo Ester Gunawan

Direktur : Ina Dashinta Hamid -

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, Ketua Internal Audit Perusahaan adalah Rendra Joyo Adinegoro. Sekretaris Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Dwi Indriyanie.

Sebagai perusahaan publik, Perusahaan telah memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit yang diwajibkan oleh OJK. Susunan Komite Audit pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua 30 September 2021 31 Desember 2020

Choi Jung Sik Antonius Hanifah Komala

Anggota : Yoon Young Jun Endang Sulastri Anggota : Yustina Peniyanti Lenny Anggraini

Pada tanggal 12 Februari 2011, Perusahaan secara resmi mengoperasikan Unit Usaha Syariah. Perusahaan telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional pada tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan surat No U-375/DSN-MUI/XI/2010 dan melaporkan keberadaan Unit Usaha Syariah kepada Departemen Keuangan pada tanggal 8 Desember 2010.

Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah DR. Jaenal Effendi, S. Ag, MA.

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah 84 dan 72 karyawan.

Laporan keuangan PT KDB Tifa Finance Tbk yang berakhir 30 September 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 Oktober 2021. Direksi Perusahaan dimaksud adalah yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, dan Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 September 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan dalam Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah Rp 14.307 dan Rp 14.105, (dalam Rp penuh) per US\$ 1.

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Kas dan Setara Kas dan Penempatan di Bank

(1) Kas dan setara kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

(2) Penempatan di bank

Penempatan di Bank merupakan kas dan setara kas yang dijaminkan ke bank.

e. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- 1. Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan; dan
- 2. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 30 September 2021 dan Desember 2020, aset keuangan Perusahaan terdiri dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

2. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan métode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 30 September 2021 kategori ini meliputi kas dan setara kas dan penempatan di bank, piutang pembiayaan multiguna, piutang sewa pembiayaan, tagihan anjak piutang, pinjaman diberikan, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Sejak 1 Januari 2020, liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan métode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Pada tanggal 30 September 2021, kategori ini meliputi pinjaman yang diterima, beban akrual dan liabilitas lain-lain.

Instrumen Keuangan Derivatif

Instrumen derivatif diakui sebesar nilai wajarnya pada laporan posisi keuangan. Tagihan dan liabilitas derivatif disajikan sebesar jumlah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari transaksi derivatif, Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar dan nilai kontrak instrumen derivatif pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga, atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa.

Perusahaan hanya melakukan kontrak instrumen keuangan derivatif untuk melindungi eksposur yang mendasarinya ("underlying"). Instrumen keuangan derivatif diukur sebesar nilai wajarnya dan perubahan nilai wajarnya diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Perusahaan mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan mengacu pada perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("ECL"). Dalam melakukan penilaian, Perusahaan juga membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengukuran awal, maka Perusahaan akan mengukur cadangan kerugian untuk aset keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Jika risiko kredit atas aset keuangan meningkat secara signifikan, maka pengukuran cadangan kerugian untuk aset keuangan tersebut menggunakan ECL sepanjang umurnya (*lifetime*).

Perusahaan menggunakan pendekatan 3 tahapan dalam mengukur penurunan nilai (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas aset keuangan sejak awal atau fasilitas tersebut gagal bayar pada tanggal pelaporan.

1. Tahap 1 - Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") 12 bulan

Tahap 1 mencakup aset keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai Tahap 1 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan kurang atau sama dengan 30 hari.

2. Tahap 2 - Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Tahap 2 mencakup aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit, namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL lifetime dihitung.

Aset keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dikategorikan sebagai Tahap 2 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan dari 31-90 hari. Aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi, juga dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sehingga akan dikategorikan sebagai Tahap 2.

3. Tahap 3 - Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar

Tahap 3 mencakup aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah impaired (gagal bayar).

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai Tahap 3 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan lebih dari 90 hari.

Faktor utama dalam menentukan apakah aset keuangan memerlukan *ECL* 12 bulan (Tahap 1) atau *ECL* lifetime (Tahap 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). Penentuan kriteria peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada tanggal pelaporan.

PSAK No. 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini membutuhkan estimasi forward-looking dari Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD).

Probability of Default ("PD")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (Tahap 1) atau sepanjang umur (Tahap 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada suatu titik waktu (*point in time*) dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Loss Given Default ("LGD")

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Perusahaan mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari seluruh aset yang dikelola oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi masa depan.

Exposure of Default ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur laporan posisi keuangan pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang hampir pasti terjadi (*committed*), pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Perusahaan tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau
- c. Perusahaan telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Sewa Pembiayaan

Sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.

Jumlah yang terutang dari *lessee* dalam sewa pembiayaan dicatat sebesar jumlah piutang sewa pembiayaan. Piutang sewa pembiayaan terdiri dari jumlah piutang sewa ditambah nilai residu yang dijamin (harga opsi) yang akan diterima pada akhir masa sewa, dikurangi penghasilan pembiayaan tangguhan, simpanan jaminan, dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin dengan biaya perolehan aset sewaan dicatat sebagai penghasilan pembiayaan tangguhan dan dialokasikan sebagai pendapatan selama masa sewa berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala yang tetap dari piutang sewa pembiayaan. Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa pembiayaan yang telah menunggak pembayaran lebih dari 90 hari. Pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

Pada awal masa sewa, apabila aset sewaan memiliki nilai residu pada akhir periode sewa, *lessee* diwajibkan untuk memberikan simpanan jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai aset sewa pada akhir masa sewaan, bila hak opsi dilaksanakan *lessee*. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *lessee*.

Apabila aset sewaan dijual kepada *lessee* sebelum masa sewa berakhir, maka perbedaan harga jual dengan investasi neto pembiayaan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat terjadinya.

h. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan multiguna berakhir dianggap sebagai pembatalan perjanjian pembiayaan multiguna dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi.

Untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan *chanelling* tanpa jaminan (*without recourse*), piutang pembiayaan konsumen disajikan sebesar porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai oleh Perusahaan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank, dalam rangka transaksi tersebut. Untuk kerjasama penerusan pinjaman konsumen dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh total angsuran dari pelanggan sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai utang (pendekatan bruto). Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai bagian dari beban pembiayaan.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Properti Investasi

Properti investasi, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian untuk bagian tertentu dari properti investasi yang telah ada pada saat beban terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya selama 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Nilai residu, jika ada, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

k. Aset Tetap

Aset tetap kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode saldo menurun berganda selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/
	Years
Bangunan	20
Peralatan kantor	4 - 8
Kendaraan	8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

I. Transaksi Sewa

Sebagai Pesewa

Sewa Operasi

Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laba rugi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

Sebagai Penyewa

Perusahaan menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau yang telah berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

m. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

ljarah Muntahiyah Bityamlik adalah Ijarah dengan wa'ad (janji) perpindahan kepemilikan aset yang diljarah-kan pada saat tertentu. Dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik, perpindahan kepemilikan suatu aset yang di Ijarahkan dari pemilik ke penyewa, dilakukan jika akad Ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset Ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah.

Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik disusutkan berdasarkan pola konsumsi berdasarkan perjanjian Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Pendapatan Ijarah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban penyusutan aset Ijarah.

Piutang pendapatan Ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

n. Tagihan dari Jaminan yang Dikuasai Kembali

Tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait piutang sewa pembiayaan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang sewa pembiayaan direklasifikasi menjadi tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai realisasi bersih dicatat sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai" dari tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali dan diakui sebagai beban pada laba rugi.

Selisih lebih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat tagihan akan dikembalikan ke konsumen. Sedangkan selisih kurang antara nilai tercatat tagihan dengan hasil penjualan akan dihapuskan.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahuntahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali pendapatan bunga dari piutang pembiayaan konsumen yang telah menunggak pembayaran lebih dari 90 hari, dimana pendapatan bunga tersebut diakui pada saat telah diterima.

Pendapatan dari aset untuk disewakan (pendapatan sewa operasi) dibukukan dengan menggunakan metode garis lurus selama masa periode sewa.

Pendapatan administrasi yang terjadi sehubungan dengan transaksi sewa, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang masing-masing diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan dan beban lainnya masing-masing diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

r. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

s. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

t. Aset Pengampunan Pajak

Pada saat pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Aset pengampunan pajak dikreditkan pada akun tambahan modal disetor. Uang tebusan yang dibayarkan untuk pengampunan pajak diakui dalam laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal aset pengampunan pajak mengacu pada masing-masing kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan Perusahaan untuk aset serupa.

Aset pengampunan pajak direklasifikasi ke dalam pos aset serupa ketika Perusahaan mengukur kembali aset pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan pada tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

u. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar selama tahun bersangkutan.

v. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan.

w. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

x. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi.

Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Nilai tercatat aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Kas dan setara kas dan		
penempatan di bank	537.813.214	252.940.291
Piutang sewa pembiayaan - besih	665.974.587	659.867.738
Piutang pembiayaan multiguna - bersih	21.812.046	5.464.291
Piutang lain-lain	952.839	2.523.251
Aset lain-lain		
Deposito berjangka	70.000.000	-
Simpanan jaminan	1.075.399	350.216
Jumlah Aset Keuangan	1.297.628.085	921.145.787

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidapastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

e. Komitmen Sewa

Komitmen Sewa - Perusahaan Sebagai Penyewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

Komitmen Sewa Operasi - Perusahaan Sebagai Pesewa

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian mobil dan mesin. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 20.

b. Estimasi Masa Manfaat Properti Investasi, Aset Tetap dan Aset untuk Disewakan

Masa manfaat dari masing-masing properti investasi, aset tetap dan aset untuk disewakan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktorfaktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap properti investasi, aset tetap dan aset untuk disewakan akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat properti investasi, aset tetap dan aset untuk disewakan.

Nilai tercatat aset-aset tersebut diungkapkan pada Catatan 8 dan 9.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 29 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan pada Catatan 27.

d. Aset dan Utang Pajak Tangguhan

Aset dan Utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang siginifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui, berdasarkan kemungkinan waktu realisasinya dan jumlah laba kena pajak di masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 28.

e. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Nilai tercatat aset-aset non keuangan tersebut pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 diungkapkan pada Catatan 8 dan 9.

4. Kas dan Setara Kas dan Penempatan di Bank

Kas dan Setara Kas

	30 September 2021	31 Desember 2020
Kas Rupiah	18,000	18,000
Bank - Pihak ketiga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	871,220	1,012,379
PT Bank Shinhan Indonesia	744,068	1,109,801
PT Bank KB Bukopin Tbk	653,821	-
PT Bank Central Asia Tbk	383,239	1,318,210
PT Bank CIMB Niaga Tbk	350,141	43,632
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -		
Unit Usaha Syariah	139,553	138,716
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	55,469	744,860
PT Bank BCA Syariah	59,725	89,474
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	43,002	43,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24,906	38,676
PT Bank Sinarmas Tbk	12,106	107,152
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	7,567	7,974
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,061	200,297
PT Bank Syariah Indonesia	3,991	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	3,502	5,286
PT Bank IBK Indoneisa	1,000	5,260
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	320,849
PT Bank Mayora	-	94,023
PT Bank BTPN Tbk	-	2,254
Jumlah	3,358,371	5,276,583
Dolor Amerika Scriket (Cotaton 35)		
Dolar Amerika Serikat (Catatan 35)	E4 266 600	
PT Bank Shinhan Indonesia PT Bank Central Asia Tbk	54,366,600 8,374,520	40 211 074
PT Bank Woori Saudara Indonesia	2,265,954	49,311,974 14,105
PT Bank Sinarmas Tbk	810,931	781,266
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	244,872	339,003
PT Bank KB Bukopin Tbk	98,959	-
Jumlah	66,161,836	50,446,348
Jumlah - Bank	69,520,207	55,722,931
Deposito on call - Pihak ketiga		
Dolar Amerika Serikat (Catatan 35)		
PT Bank Sinarmas Tbk		4,231,500
Deposito berjangka - Pihak ketiga		
Dolar Amerika Serikat (Catatan 35)		
PT Bank Woori Indonesia	-	77,577,500
PT Bank KB Bukopin Tbk	28,614,000	
Jumlah deposito berjangka	28,614,000	77,577,500
Rupiah (Catatan 35)		
PT Bank IBK Indoneisa	100,000,000	-
PT Bank Shinhan Indonesia	100,000,000	-
PT Bank BCA Syariah	60,000,000	-
PT Bank Sinarmas Tbk	35,200,000	-
PT Bank KB Bukopin Tbk	30,000,000	<u> </u>
Jumlah deposito berjangka	325,200,000	-
lumlah	400 050 007	127 540 024
Jumlah	423,352,207	137,549,931

	30 September 2021	31 Desember 2020
Suku bunga rata-rata per tahun		
Dolar Amerika Serikat		0.400/
Deposito on call Deposito berjangka	- 1.25%	0.10% 1.25%
Бероѕію Бегјандка	1.25%	1.25%
Rupiah		
Deposito on call	-	-
Deposito berjangka	3.90%	-
Penempatan di Bank		
	30 September 2021	31 Desember 2020
Bank - Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	454,066
PT Bank CIMB Niaga Tbk -		
Unit Usaha Syariah	5,007	17,303
PT Bank BTPN Tbk		78,991
Jumlah - Bank	5,007	550,360
Deposito berjangka - Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	2,000,000
Dolar Amerika Serikat (Catatan 35)		
PT Bank Central Asia Tbk	114,456,000	112,840,000
	114,456,000	114,840,000
Jumlah	114,461,007	115,390,360
Suku bunga rata-rata per tahun deposito berjangka		
Rupiah	-	4.25%
Dolar Amerika Serikat	0.40%	0.40%

Penempatan di bank merupakan penempatan kas pada bank - pihak ketiga terkait pinjaman yang diterima dan fasilitas *cross currency swap* Perusahaan (Catatan 15 dan 33).

5. Piutang Sewa Pembiayaan

	30 September 2021	31 Desember 2020
Piutang sewa pembiayaan - kotor		
Rupiah	723,481,583	752,424,050
Dolar Amerika Serikat (Catatan 35)	82,302,065	83,239,755
Jumlah	805,783,648	835,663,805
Jumlah	805,783,648	835,663,805
Nilai residu yang dijamin	452,885,299	481,015,932
Penghasilan pembiayaan tangguhan	(111,726,144)	(135,745,480)
Simpanan jaminan	(452,885,299)	(481,015,932)
Jumlah	694,057,504	699,918,325
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28,082,919)	(40,050,587)
Jumlah - Bersih	665,974,585	659,867,738
Suku bunga rata-rata per tahun		
Rupiah	13.78%	15.42%
Dolar Amerika Serikat	4.76%	7.70%

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tanggal 30 September 2021 telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Rincian piutang sewa pembiayaan berdasarkan jatuh tempo perjanjiannya adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	286,141,911	76,224,042
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	223,946,827	232,705,710
Lebih dari 2 tahun	295,694,910	526,734,053
Jumlah	805,783,648	835,663,805

Pengelompokan piutang sewa pembiayaan menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

30 September 2021		31 Desember 2020	
Tidak ada tunggakan	765,969,800	719,601,979	
1 - 90 hari	10,630,781	86,451,131	
91 - 120 hari	223,695	6,806,092	
121 - 180 hari	2,453,834	9,367,481	
diatas 180 hari	26,505,538	13,437,122	
Jumlah	805,783,648	835,663,805	

Rincian piutang sewa pembiayaan, berdasarkan jenis aset yang dibiayai adalah sebagai berikut:

	30 September 2021 31 Desember	
Alat berat	388,455,162	260,006,424
Mesin	185,827,526	176,934,283
Tanah dan Bangunan	123,109,563	177,518,081
Kendaraan	31,435,916	51,633,860
Kapal	66,087,446	105,388,491
Lainnya	10,868,035	64,182,666
Jumlah	805,783,648	835,663,805

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang sewa pembiayaan.

Mutasi piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020	
Saldo awal	323,121,573	131,365,806	
Restrukturisasi selama tahun berjalan	227,001,609	435,504,534	
Pengurangan selama tahun berjalan	(321,733,022)	(243,748,767)	
Jumlah	228,390,160	323,121,573	

Piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 18.588.880 dan Rp 237.473.553 masing-masing pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 digunakan sebagai jaminan atas surat utang jangka menengah dan pinjaman yang diterima oleh Perusahaan (Catatan 13 dan 15).

6. Piutang Pembiayaan Multiguna

	30 September 2021	31 Desember 2020	
Piutang pembiayaan multiguna - kotor Pihak ketiga			
Rupiah	24,912,532	7,804,630	
Pendapatan pembiayaan multiguna yang belum diakui	(2,788,318)	(1,447,122)	
Jumlah - bersih Cadangan kerugian penurunan nilai	22,124,214 (312,168)	6,357,508 (893,217)	
Jumlah - Bersih	21,812,046	5,464,291	
Suku bunga rata-rata per tahun Rupiah	13.10%	18.32%	

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tanggal 30 September 2021 telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan multiguna.

Rincian piutang pembiayaan multiguna berdasarkan jatuh tempo perjanjiannya adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	12,470,179	2,450,232	
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun Lebih dari 2 tahun	6,139,683 6,302,670	660,951 4,693,447	
Jumlah	24,912,532	7,804,630	

Pengelompokan piutang pembiayaan multiguna menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Tidak ada tunggakan	22,508,025	4,279,994
1 - 90 hari	2,204,134	3,524,636
91 - 120 hari	-	-
121 - 180 hari	9,435	-
diatas 180 hari	190,938	
Jumlah	24,912,532	7,804,630

Mutasi piutang pembiayaan multiguna yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	3,029,054	4,906,471
Restrukturisasi selama tahun berjalan	32,998	2,630,064
Pengurangan selama tahun berjalan	(2,709,408)	(4,507,481)
Jumlah	352,644	3,029,054

7. Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga

30 Juni 2021		31 Desember 2020	
Piutang karyawan Bunga Lain-lain	681,592 - 271,247	425,556 60,706 2,036,989	
Laiiriaiii	211,241	2,030,909	
Jumlah	952,839	2,523,251	

Piutang karyawan merupakan piutang tanpa bunga dan dibayar melalui pengurangan gaji bulanan.

Tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Properti Investasi

Properti investasi pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

		Perubahan sela Januari - Septe		
	1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	30 September 2021
Biaya perolehan:				
Tanah	702,000	-	-	702,000
Bangunan	11,659,182	<u> </u>	<u>-</u>	11,659,182
Jumlah	12,361,182	- =	<u>-</u>	12,361,182
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	2,429,302	437,219	<u> </u>	2,866,521
Nilai Tercatat	9,931,880			9,494,661
		Perubahan selan	na tahun 2020	
	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
Biaya perolehan:				
Tanah	702,000	-	-	702,000
Bangunan	11,659,182	<u> </u>	<u> </u>	11,659,182
Jumlah	12,361,182		-	12,361,182
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	1,846,343	582,959	<u>-</u>	2,429,302
Nilai Tercatat	10,514,839			9,931,880

Properti investasi pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Lokasi	30 September 2021 dan 31 Desember 2020
Tanah seluas 54 m2 dan bangunan ruko seluas 88 m2	Cibubur, Jakarta	1,369,000
Tanah seluas 540 m2	Cikarang, Bekasi	702,000
Ruang perkantoran seluas 214,05 m2	APL Tower, Jakarta	9,880,182
Tanah seluas 320 m2 dan bangunan 140 m2	Banjar baru, Banjarmasin	410,000
Jumlah		12,361,182

Nilai wajar properti investasi berdasarkan estimasi manajemen pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 12.200.000.

Beban penyusutan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 26) pada laba rugi.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas properti investasi.

9. Aset Tetap

1	Januari 2021	Penambahan	Reklasifikasi		
			INENIASIIINASI	Pengurangan	30 September 2021
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	656,040	-	-	-	656,040
Bangunan	1,727,560	-	-	-	1,727,560
Peralatan kantor	9,902,658	323,967	4,556,718	(1,267,374)	13,515,969
Kendaraan	6,132,150	-		(310,523)	5,821,627
Konstruksi Berlangsung	-	4,556,718	(4,556,718)		-
Aset hak guna					
Ruang kantor	2,119,782	12,066,412	<u> </u>	(1,457,171)	12,729,023
Jumlah	20,538,190	16,947,097	<u> </u>	(3,035,068)	34,450,219
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	568,655	64,784	-	-	633,439
Peralatan kantor	5,950,279	2,481,493	-	(1,244,730)	7,187,042
Kendaraan	5,851,355	49,670	-	(284,304)	5,616,721
Aset hak guna					
Ruang kantor	1,566,521	1,710,646		(1,457,171)	1,819,996
Jumlah	13,936,810	4,306,593	<u> </u>	(2,986,205)	15,257,198
Nilai Tercatat	6,601,380				19,193,021

	1 Januari 2020	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	31 Desember 2020
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	1,753,590	-	-	(1,097,550)	656,040
Bangunan	7,671,610	-	-	(5,944,050)	1,727,560
Peralatan kantor	5,394,849	4,651,311	-	(143,502)	9,902,658
Kendaraan	6,132,150	-	-	-	6,132,150
Aset hak guna		-	-	-	
Ruang kantor		2,119,782	<u> </u>	<u>-</u>	2,119,782
Jumlah	20,952,199	6,771,093	<u> </u>	(7,185,102)	20,538,190
Akumulasi penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	1,745,390	334,045	-	(1,510,779)	568,656
Peralatan kantor	4,213,501	1,880,280	-	(143,502)	5,950,279
Kendaraan	5,762,884	88,471	-	-	5,851,355
Aset hak guna	-	-	-	-	
Ruang kantor		1,566,521	<u> </u>	<u>-</u>	1,566,521
Jumlah	11,721,775	3,869,317	<u> </u>	(1,654,281)	13,936,811
Nilai Tercatat	9,230,424				6,601,379

Beban penyusutan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 26) pada laba rugi.

Pengurangan merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Harga jual Nilai tercatat	176,500 46.036	9,200,800 5,530,821
Milai tercatat	40,036	3,330,621
Keuntungan penjualan aset tetap	130,464	3,669,979

Pengurangan merupakan penghancuran aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Biaya perolehan	1,573,184	-
Akumulasi penyusutan	(1,570,357)	<u>-</u>
Kerugian atas penghancuran aset tetap	2,827	

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak yang di Jakarta dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang sampai dengan tanggal laporan keuangan masih dalam proses pengurusan dan di Semarang dengan Hak Guna Bangunan yang dapat diperbaharui dan berjangka waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2034. Perusahaan berkeyakinan bahwa Hak Guna Bangunan tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo, karena seluruh aset tanah diperoleh secara legal dan didukung dengan dokumen kepemilikan yang memadai.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, aset tetap Perusahaan berupa gedung dan kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Raksa Pratikara dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.039.570 dan Rp 7.433.984.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

10. Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Akun ini merupakan beberapa alat berat milik Perusahaan yang digunakan untuk sewa guna secara Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) kepada pelanggan, sebagai berikut:

		Perubahan selama periode Januari - September 2021		
	1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	30 September 2021
Biaya perolehan	331,486,821	52,115,551	(218,262,530)	165,339,842
Akumulasi penyusutan	188,301,911	61,568,930	(150,476,133)	99,394,708
Cadangan kerugian penurunan nilai	4,251,481	2,294,778	<u> </u>	6,546,259
Jumlah	192,553,392			105,940,967
Nilai Tercatat	138,933,429			59,398,875
	_	Perubahan selam	a tahun 2020	
	1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
Biaya perolehan	490,534,532	116,417,273	(275,464,984)	331,486,821
Akumulasi penyusutan	307,698,057	130,834,974	(250,231,120)	188,301,911
Cadangan kerugian penurunan nilai	6,365,303	6,740,431	(8,854,252)	4,251,481
Jumlah	314,063,360		,	192,553,392
Nilai Tercatat	176,471,172			138,933,429

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 61.568.930 dan Rp 130.834.974 dibukukan sebagai bagian dari "Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik - bersih" pada laba rugi.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset IMBT adalah cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai yang mungkin terjadi.

Aset IMBT diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas Syariah, PT ACA Syariah, PT Pan Pacific Syariah, PT Himalaya Pelindung, PT Wahana Tata, PT QBE Pool Indonesia, PT Raksa Pratikara dan PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak-pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 114.373.139 pada tanggal 30 September 2021 serta Rp 242.233.791 pada tanggal 31 Desember 2020.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 aset IMBT digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan (Catatan 15).

Sebagian aset IMBT merupakan penerusan pinjaman dari PT SMFL Leasing Indonesia (Catatan 19).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah muntahiyah bittamlik adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	4,251,481	6,365,303
Restrukturisasi selama tahun berjalan	23,029,394	6,740,430
Pengurangan selama tahun berjalan	(12,630,920)	(8,854,252)
Jumlah	14,649,955	4,251,481

11. Aset Pengampunan Pajak

Pada tanggal 20 September 2016, Perusahaan menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak ke kantor pajak sehubungan dengan keikutsertaan Perusahaan dalam program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 23 September 2016, Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan dengan No. KET-225/PP/WPJ.07/2016 sebagai bukti pemberian pengampunan pajak.

Aset pengampunan pajak yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak terdiri dari tanah senilai Rp 1.000.000.

Aset pengampunan pajak sebesar Rp 1.000.000 di kreditkan pada akun tambahan modal disetor di ekuitas pada laporan posisi keuangan.

12. Aset Lain-lain - Bersih

	30 September 2021	31 Desember 2020
Tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali -		
setelah dikurangi cadangan kerugian		
penurunan nilai sebesar Rp 23.693.866		
pada tanggal 30 September 2021		
dan sebesar Rp 12.434.072 pada		
tanggal 31 Desember 2020	49,408,527	18,712,294
Deposito berjangka, lebih dari 3 bulan	70,000,000	-
Simpanan jaminan	1,075,399	350,217
Jumlah - Bersih	120,483,926	19,062,511

Tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan dari jaminan yang dikuasai kembali adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Saldo awal tahun Penambahan Penghapusan	12,434,072 11,259,794 	1,826,964 11,704,145 (1,097,037)
Saldo akhir tahun	23,693,866	12,434,072

13. Surat Utang Jangka Menengah

	30 September 2021	31 Desember 2020
Nilai nominal Biaya emisi yang belum diamortisasi	<u> </u>	35,262,415 (15,556)
Jumlah	<u>-</u>	35,246,859

Pada tanggal 30 Agustus 2018, Perusahaan menerbitkan *Medium Term Notes* IV (MTN IV) dengan nilai nominal sebesar US\$ 10.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2021. Perusahaan menerbitkan MTN IV dengan tujuan untuk membiayai kegiatan utama Perusahaan yaitu sewa pembiayaan.

MTN IV mempunyai suku bunga tetap sebesar 6,25% per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan

Perusahaan menunjuk PT BCA Sekuritas sebagai agen dan penata usaha (*arranger*), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai agen pembayaran dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau dan jaminan sesuai dengan Akta No. 51 tanggal 30 Agustus 2018 dari Ir. Nanette C. H Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 saldo MTN IV masing-masing sebesar US\$ 0 dan US\$ 2.499.994 (ekuivalen Rp 0 dan Rp 35.262.415).

Dalam perjanjian penerbitan MTN III dan IV mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan selama pokok MTN III dan IV belum dilunasi antara lain tidak diperkenankan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kecuali untuk kegiatan usaha Perusahaan, melakukan penggabungan atau peleburan usaha, menjual aset tetap sebanyak lebih dari 10% aset Perusahaan, mengubah bidang usaha Perusahaan serta mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mematuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut dan telah dilunasi pada bulan Januari 2021.

14. Utang Pajak

	30 September 2021	31 Desember 2020
Pajak penghasilan badan (Catatan 28)	1,797,937	5,460,858
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)	99,547	-
Pasal 21	409,146	238,320
Pasal 23	16,343	15,941
Pasal 26	-	20,886
Pasal 25	501,689	394,893
Jumlah	2,824,662	6,130,898

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

15. Pinjaman yang Diterima

Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari pihak-pihak sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	54,738,469	204,389,562
PT Bank Shinhan Indonesia	-	-
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	-	31,923,150
PT Bank CIMB Niaga Tbk		
- Unit Usaha Syariah	-	5,405,595
PT Bank BTPN Tbk	-	29,734,234
PT Bank Mayora	-	10,115,860
Jumlah	54,738,469	281,568,401
Dolar Amerika Serikat (Catatan 35)		
Korea Development Bank	286,140,000	282,100,000
Jumlah	340,878,469	563,668,401

Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah saldo setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp 205.106 dan Rp 660.796. Suku bunga per tahun dari pinjaman yang diterima Perusahaan adalah sebagai berikut:

30 September 2021 31 Desember 2020 4,00% - 8,00% 8,00% - 12,00% 0,76%

Rupiah Dollar Amerika Serikat

a. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Fasilitas Pinjaman Angsuran yang diterima Perusahaan dari BCA adalah sebagai berikut:

- 1. Pada tahun 2015, sebesar Rp 120.000.000 dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun sejak tanggal penarikan dan masa penarikan selama enam (6) bulan.
- 2. Pada tahun 2016, sebesar Rp 50.000.000 dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dan masa penarikan selama enam (6) bulan.
- 3. Pada tahun 2017, sebesar Rp 100.000.000 dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dan Rp 50.000.000 dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun sejak tanggal penarikan dengan masa penarikan selama enam (6) bulan.
- 4. Pada tahun 2018, sebesar Rp 150.000.000 dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dengan masa penarikan selama enam (6) bulan dan perpanjangan terakhir sampai dengan 13 Mei 2019.
- Pada tahun 2019, sebesar Rp 106.000.000 dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun sejak tanggal penarikan dengan masa penarikan selama enam (6) bulan.
- 6. Fasilitas kredit lokal pada tahun 2019, dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000.000 *(revolving)* dengan tenor pembiayaan satu (1) tahun.
- 7. Fasilitas kredit lokal pada tahun 2020, dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000.000 (revolving) dengan tenor pembiayaan enam (6) bulan. Sehubungan dengan fasilitas ini, saldo penempatan di bank sebesar US\$ 8.000.000 (ekuivalen Rp 114.456.000) (Catatan 4). Fasilitas ini diperpanjang sampai dengan Mei 2022.

Fasilitas pinjaman dari BCA dijamin dengan piutang sewa pembiayaan Perusahaan (Catatan 6).

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 440.836.754 dan Rp 110.265.291 masing-masing pada tahun 2021 (9 bulan) dan 2020.

b. PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (JTrust)

Fasilitas Kredit Executing Multifinance yang diterima Perusahaan dari Jtrust adalah sebagai berikut:

- 1. Pada tahun 2015, sebesar Rp 100.000.000 (*non revolving*) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama dua belas (12) bulan.
- 2. Pada tahun 2016, sebesar Rp 100.000.000 (*revolving*) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama dua belas (12) bulan.
- 3. Pada tahun 2017, sebesar Rp 50.000.000 *(revolving)* dan Rp 50.000.000 *(non revolving)* dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun dan masa penarikan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.
- 4. Pada tahun 2018, sebesar Rp 100.000.000 *(revolving)* dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun dan masa penarikan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.

5. Pada tahun 2019, sebesar Rp 100.000.000 *(revolving)* dengan tenor pembiayaan lima (5) tahun dan masa penarikan pinjaman selama 12 (dua belas) bulan.

Fasilitas pinjaman dari Bank JTrust dijamin dengan piutang sewa pembiayaan Perusahaan (Catatan 5).

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 32.065.272 dan Rp 98.807.835 masing-masing pada tahun 2021 (9 bulan) dan 2020.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari JTrust, saldo kas dibank yang dibatasi pencairannya pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 454.066 (Catatan 4).

c. PT Bank BTPN Tbk (BTPN)

Pada tanggal 12 Juli 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Angsuran Berjangka (PAB) dengan BTPN dengan jumlah maksimum sebesar Rp 100.000.000 *(non revolving)* dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama (enam) 6 bulan.

Fasilitas pinjaman dari BTPN dijamin dengan piutang sewa pembiayaan Perusahaan (Catatan 5).

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 29.805.429 dan Rp 40.763.921 masing-masing pada tahun 2021 (9 bulan) dan 2020.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari BTPN, saldo kas di bank yang dibatasi pencairannya pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 78.991 (Catatan 4).

d. PT Bank Cimb Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah (CIMB Niaga Syariah)

Fasilitas Perjanjian Tetap Khusus (PTK) yang diterima Perusahaan dari CIMB Niaga Syariah adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Juni 2017, fasilitas PTK melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Murabahah dari CIMB Niaga Syariah sebesar Rp 30.000.000 (non revolving) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama dua belas (12) bulan.
- Pada tanggal 9 Juli 2018, fasilitas PTK melalui Perjanjian Kerjasama Fasilitas Musyarakah dari CIMB Niaga Syariah sebesar Rp 30.000.000 (non revolving) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama dua belas (12) bulan.

Fasilitas pembiayaan dari Bank CIMB Niaga Syariah dijamin dengan aset IMBT Perusahaan (Catatan 10).

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 5.405.595 dan Rp 17.569.996 masing-masing pada tahun 2021 (9 bulan) dan 2020.

Sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari CIMB Niaga Syariah, saldo kas di bank dibatasi pencairannya pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 5.007 dan Rp 17.303 (Catatan 4).

e. PT Bank Mayora (Mayora)

Pada tanggal 20 Januari 2020 Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Mayora Tbk sebesar Rp 100.000 (*non revolving*) dengan tenor pembiayaan tiga (3) tahun dan masa penarikan pinjaman selama enam (6) bulan.

Pembayaran pinjaman pokok adalah sebesar Rp 10.116.691 dan Rp 3.113.775 pada tahun 2021 (9 bulan) dan 2020.

f. PT Bank Shinhan Indonesia

Pada bulan Januari 2021, Perusahaan melakukan penarikan Fasilitas Kredit Pinjaman Korporasi (Modal Kerja) dari PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp 120.000.000. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan *Letter of Comfort* atas nama KDB International Dept. HQ.

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 23 September 2021.

g. Korean Development Bank

Pada tanggal 3 Desember 2020, Perusahaan menandatangi Perjanjian Pinjaman dengan KDB sebesar US\$ 20.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk modal kerja dan tanpa jaminan. Perjanjian pinjaman ini berjangka waktu dua (2) tahun (Catatan 31).

Hingga tanggal pelaporan ini, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pinjaman pokok.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan Perusahaan untuk mengubah akta pendirian; memindahkan aset; melakukan likuidasi, kombinasi bisnis, atau akuisisi; mengubah sifat usaha; dan mewajibkan untuk memelihara beberapa rasio keuangan tertentu yakni Rasio Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Aset paling rendah 40% dan *Gearing Ratio* paling tinggi 10 kali. Perjanjian pinjaman ini juga menyebutkan hal-hal yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian utang yang disebutkan diatas.

16. Liabilitas Sewa

Berikut adalah pembayaran sewa minimum masa yang akan datang (future minimum lease payment) berdasarkan perjanjian sewa:

	30 September 2021	31 Desember 2020
latuh tampa:		
Jatuh tempo:		
Sampai dengan 1 tahun	2,897,330	238,951
Lebih dari 1 tahun hingga 2 tahun	2,837,592	-
Lebih dari 2 tahun	6,384,581	-
Dikurangi bunga	(1,922,069)	(11,795)
Nilai tunai dari pembayaran sewa minimum	10,197,434	227,156

Nilai tunai pembayaran sewa minimum merupakan liabilitas kepada pihak ketiga. Liabilitas sewa berasal dari transaksi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai standar akuntansi yang berlaku pada masing-masing tahun.

17. Beban Akrual

	30 September 2021	31 Desember 2020
Bagi hasil dan bunga pinjaman		
yang diterima	425,097	963,956
Lain-lain	1,720,500	605,000
Jumlah	2,145,597	1,568,956

18. Uang Muka Pelanggan

	30 September 2021	31 Desember 2020
Uang muka fasilitas pembiayaan Titipan nasabah untuk pembayaran premi	37,084,094	45,997,416
asuransi	2,880,404	4,039,491
Titipan notaris	621,456	536,957
Jumlah	40,585,954	50,573,864

19. Liabilitas Lain-lain

	30 September 2021	31 Desember 2020
Liabilitas atas penerusan pinjaman	1,643,399	65,756,850
Lain-lain	23,093,355	15,055,565
Jumlah	24,736,754	80,812,415

Liabilitas atas penerusan pinjaman merupakan liabilitas kepada PT SMFL Leasing Indonesia dan PT Verena Finance Tbk terkait pengadaaan barang modal melalui pembelian cicilan dengan jangka waktu 3-5 tahun dan sebagian telah jatuh tempo pada Agustus 2021. Pengadaaan barang modal ini kemudian diteruskan kepada nasabah melalui aset IMBT (Catatan 10).

20. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Perusahaan:

	30 September 2021			
		Pengukuran nilai v	vajar menggunakan:	
	Nilai Tercatat/	Harga kuotasian dalam pasar aktif (Level 1)	Input signifikan yang dapat di observasi (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)
Aset yang nilai wajarnya disajikan:				
Piutang pembiayaan multiguna	21,812,046	-	21,812,046	-
Properti investasi	9,494,661	-	-	12,200,000
Aset lain-lain				
Setoran jaminan	1,075,399	-	1,075,399	-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:				
Pinjaman diterima	340,878,469	-	340,878,469	-
Liabilitas lain-lain				
Liabilitas atas penerusan pinjaman	2,762,648	-	2,762,648	-

	31 Desember 2020 Pengukuran nilai wajar menggunakan:			
	Nilai Tercatat	Harga kuotasian dalam pasar aktif (Level 1)	Input signifikan yang dapat di observasi (Level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3)
Aset yang nilai wajarnya disajikan:				
Piutang pembiayaan multiguna	5,464,291	-	5,464,291	-
Properti investasi Aset lain-lain	9,931,880	-	-	12,200,000
Setoran jaminan	350,216	-	346,714	-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:				
Surat utang jangka menengah	35,246,860	-	35,246,860	-
Pinjaman diterima Liabilitas lain-lain	563,668,401	-	563,668,401	-
Liabilitas atas penerusan pinjaman	65,756,850	-	65,756,850	-

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 3. Nilai wajar properti investasi diestimasi berdasarkan pendekatan pasar pembanding dengan penyesuaian yang dianggap relevan oleh manajemen.

21. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

		30 Septermber 2021	
	Jumlah Saham Ditempatkan		Jumlah Modal Ditempatkan
Pemegang Saham	dan Disetor Penuh	Presentase Kepemilikan	dan Disetor Penuh
		%	
Korea Development Bank	3,006,779,363	84.645	300,677,936
PT Dwi Satrya Utama	532,707,259	14.997	53,270,726
Masyarakat lainnya (kepemilikan			
masing-masing kurang dari 5%)	12,726,378	0.358	1,272,638
Jumlah	3,552,213,000	100.00	355,221,300

		31 Desember 2020	
	Jumlah Saham Ditempatkan		Jumlah Modal Ditempatkan
Pemegang Saham	dan Disetor Penuh	Presentase Kepemilikan	dan Disetor Penuh
		%	
Korea Development Bank	913,914,700	84.645	91,391,470
PT Dwi Satrya Utama	161,955,000	15.000	16,195,500
Masyarakat lainnya (kepemilikan			
masing-masing kurang dari 5%)	3,830,300	0.355	383,030
Jumlah	1,079,700,000	100.00	107,970,000

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal. Utang bersih adalah jumlah utang (termasuk pinjaman diterima dan surat utang jangka menengah) dikurangi dengan kas dan setara kas dan penempatan di bank. Total modal adalah jumlah ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Jumlah utang	340,878,469	598,915,260
Jumlah ekuitas	1,022,807,659	365,195,595
Rasio utang terhadap modal	33.33%	164.00%

22. Tambahan Modal Disetor

Akun ini merupakan tambahan modal disetor sehubungan dengan penerbitan saham:

	Saldo
Saldo pada tanggal 1 Januari 2011	4,460,874
Tambahan modal disetor dari penerbitan saham	5,580,000
Dampak program pengampunan pajak	1,000,000
Jumlah	11,040,874
Biaya emisi saham	(209,952)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	10,830,922
Tambahan modal disetor dari Penawaran Umum Terbatas I	395,602,080
Jumlah	406,433,002
Biaya emisi saham	(1,700,324)
Saldo pada tanggal 30 September 2021	404,732,678

23. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

	30 September 2021	30 September 2020
Deposito On call	837,989	475,023
Deposito berjangka	374,463	-
Jasa giro	33,913_	162,603
Jumlah	1,246,365	637,626

24. Pendapatan Lain-Lain

	30 September 2021	30 September 2020
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	721,239	166,448
Keuntungan penjualan investasi jangka pendek	2,321	
Kerugian belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar		
surat-surat berharga diperdagangkan		312,993
Lain-lain	2,074,352	460,502
Jumlah - Bersih	2,797,912	939,943

25. Beban Bunga dan Bagi Hasil

	30 September 2021	30 September 2020
Pinjaman yang diterima		
Beban bunga	19,183,051	42,538,629
Bagi hasil	355,908	4,010,620
Surat utang jangka menengah	53,917	3,259,100
Jumlah	19,592,876	49,808,349

26. Beban Umum dan Administrasi

	30 September 2021	30 September 2020
Gaji dan tunjangan	24,950,948	17,702,996
Jasa profesional	645,203	2,532,647
Sewa	1,155,855	2,167,925
Penyusutan (Catatan 8 dan 9)	4,743,812	2,034,481
Administrasi bank	52,361	2,954,416
Penagihan	2,059,751	1,715,007
Perjalanan dinas	505,070	469,939
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 27)	99,000	1,444,158
Komunikasi	576,747	407,712
Pemasaran	92,137	201,179
Asuransi	345,880	244,038
Perbaikan dan pemeliharaan	358,739	215,896
Lain-lain	2,194,586	1,157,810
Jumlah	37,780,089	33,248,204

27. Imbalan Pasca-Kerja

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuaria liabilitas imbalan kerja jangka panjang terakhir, dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, tertanggal 12 Februari 2021.

Perusahaan tidak melakukan perhitungan aktuaria liabilitas imbalan pasca kerja pada laporan interim.

28. Pajak Penghasilan

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	30 September 2020
	·	
Laba sebelum pajak menurut laporan		
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	21,227,082	22,483,825
Perbedaan temporer:		
Aset hak-guna	(37,816)	-
Polici le control		
Perbedaan tetap:		
Beban gaji dan tunjangan	191,833	68,821
Rugi belum direalisasikan akibat penurunan nilai		
wajar surat-surat berharga diperdagangkan	-	267,007
Selisih cadangan kerugian		
penurunan nilai antara fiskal dan komersial	(169,605)	(9,925,752)
Keuntungan penjualan investasi		
jangka pendek	-	(580,000.00)
Pendapatan dari penghapusbukuan	(721,239)	(166,448)
Pendapatan bunga dan bagi hasil	(1,246,365)	(637,626)
Natura dan kenikmatan	2,301,543	-
Pendapatan lain-lain	89,815	(20,032)
Jumlah - bersih	445,982	(10,994,030)
Laba kena pajak	21,635,248	11,489,795
• •		
Taksiran beban pajak kini	4,759,755	2,527,755
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pasal 23	_	_
Pasal 25	2,961,818	1,882,474
1 8381 25	2,961,818	1,882,474
	2,301,010	1,002,474
Taksiran utang pajak kini (Catatan 14)	1,797,937	645,281

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021. Perusahaan sebagai wajib pajak perusahaan publik dalam negeri dengan jumlah saham beredar pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan yang disebutkan di atas. Perusahaan telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Aset pajak tangguhan Perusahaan tanggal 30 September 2021 telah dihitung dengan tarif pajak yang diperkirakan berlaku pada saat terealisasi. Laba kena pajak Perusahaan tahun 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang disampaikan Perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan utang pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

		30 Septem	30 September 2021			
		Dikreditkan (dil	oebankan) ke			
	1 Januari 2021	Laba rugi	Penghasilan komprehensif lain	30 September 2021		
Imbalan kerja jangka panjang	86,201	-	-	86,201		
Aset hak-guna	4,517	(4,517)				
Jumlah	90,718	(4,517)		86,201		
	30 September 2021					
		_				
			Penghasilan			
	1 Januari 2021	Laba rugi	komprehensif lain	30 September 2021		
Aset hak-guna		(3,803)	<u>-</u>	(3,803)		
Jumlah		(3,803)		(3,803)		
		31 Desem	ber 2020			
		Dikreditkan (dil	oebankan) ke	_		
			Penghasilan			
	1 Januari 2020	Laba rugi	komprehensif lain	31 Desember 2020		
Imbalan kerja jangka panjang	1,209,378	(1,105,929)	(17,248)	86,201		
Aset hak-guna		4,517	-	4,517		
Jumlah	1,209,378	(1,101,412)	(17,248)	90,718		

29. Dividen Kas dan Cadangan Umum

Dividen Kas

Selama tahun 2020 dan 2021, Perusahaan tidak melakukan pembagian dividen kas.

Cadangan Umum

Berdasarkan RUPS yang diadakan pada tanggal 4 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui penambahan dana cadangan sebesar Rp 50.000 pada tahun 2021.

Berdasarkan RUPS yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2020, para pemegang saham menyetujui penambahan dana cadangan sebesar Rp 50.000 pada tahun 2020.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, saldo cadangan umum adalah masing-masing sebesar Rp 500.000 dan Rp 450.000. Cadangan umum tersebut dibentuk sehubungan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk cadangan umum sedikitnya 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Tidak terdapat batas waktu yang ditetapkan atas pemenuhan kewajiban tersebut.

30. Laba Per Saham

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	30 September 2020
Laba tahun berjalan untuk perhitungan		
laba per saham	16,459,006	19,956,070
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar		
selama tahun berjalan (dalam lembar penuh)	1,354,423,667	1,079,700,000
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	12.15	18.48

31. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- Sejak tanggal 9 September 2020, pemegang saham utama Perusahaan adalah Korea Development Bank (KDB), sedangkan sebelum tanggal 9 September 2020, pemegang saham utama Perusahaan adalah PT Dwi Satrya Utama dan Tan Chong Credit Pte. Ltd.
- Perusahaan yang sebagian pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan, yakni PT Tifa Arum Realty,
 PT Naleda Boga Service, dan PT Dwi Satrya Utama.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

a. Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Jum	lah	Persentase terhadap Jumlah Aset atau Liabilitas		
	30 September 2021	31 Desember 2020	30 September 2021	31 Desember 2020	
			%	%	
Aset Aset lain-lain (Catatan 12) Simpanan jaminan PT Tifa Arum Realty	_	178,128	0.00	0.02	
Liabilitas Pinjaman yang Diterima (Catatan 15) Korea Development Bank	286.140,000	282,100,000	67.83	38.19	
Korea Development Bank	266,140,000	282,100,000	67.83	30.19	
Liabilitas sewa (Catatan 16) PT Tifa Arum Realty	<u> </u>	227,156	0.00		
Beban Beban bunga dan bagi hasil (Catatan 25) Korea Development Bank	1,531,549	158,699	2.52	0.26	
Beban umum dan administrasi (Catatan 26) Depresiasi Hak Guna Aset					
PT Tifa Arum Realty Jasa profesional	185,474	1,427,521	0.31	3.27	
PT Dwi Satrya Utama		1,320,000	0.00	3.02	
	1,717,023	2,906,220	2.83	6.55	

- b. Perusahaan menandatangi Perjanjian Pinjaman dengan KDB sebesar US\$ 20.000.000. Perjanjian pinjaman ini berjangka waktu dua (2) tahun dengan suku bunga USD Libor + 0,53% per tahun (Catatan 15).
- c. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa ruangan dengan PT Tifa Arum Realty (Catatan 33).

32. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

a. Pendahuluan dan Gambaran Umum

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- a. Risiko kredit
- b. Risiko pasar
- c. Risiko suku bunga
- d. Risiko likuiditas
- e. Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi mengenai eksposur Perusahaan terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengukur dan mengelola risiko.

Kerangka manajemen risiko

Sektor pembiayaan banyak dipengaruhi oleh risiko, baik risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, Perusahaan berupaya untuk mengelola berbagai risiko dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan manajemen risiko.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko Perusahaan di masing-masing area tertentu. Departemen Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direksi Perusahaan secara berkala.

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dalam menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang seharusnya, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya.

Komite Audit Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perusahaan dibantu oleh Departemen Internal Control. Departemen ini secara rutin dan berkala menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Perusahaan.

Berikut adalah uraian penerapan manajemen risiko Perusahaan:

1. Manajemen risiko kredit

Manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut :

Kehati-hatian dalam pemberian kredit

Perusahaan melalui Departemen Manajemen risiko menetapkan kriteria penerimaan calon nasabah yang direview secara berkala baik untuk calon nasabah Sewa, Pembiayaan Konsumen dan Anjak Piutang. Dalam memberikan kredit pembiayaan konsumen, Perusahaan menetapkan beberapa proses penilaian kredit dan scoring.

Manajemen penagihan

Perusahaan mengaplikasikan sistem penagihan melalui layanan pesan singkat (sms) untuk tagihan yang akan jatuh tempo dan memantau laporan overdue secara harian untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan dari setiap debitur lewat waktu. Usaha tersebut dalam rangka menjaga rasio kredit bermasalah, khususnya dalam masa krisis ekonomi global.

- Pengawasan internal yang kuat

Perusahaan memiliki departemen pengawasan independen (*Internal Control Unit*), yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional baik di kantor cabang maupun kantor pusat telah sesuai dengan standar prosedur operasional (*Standard Operational Procedures*).

2. Manajemen risiko pendanaan

Manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemantauan dan analisis kondisi usaha dan obyek pembiayaan

Perusahaan terus melakukan pemantauan berkala atas kondisi usaha dan industri debitur-debitur dan pengecekan obyek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemampuan debitur dan kualitas piutang sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas kredit.

- Diversifikasi sumber pendanaan

Dalam rangka mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan, Perusahaan melakukan diversifikasi pendanaan, antara lain dengan alternatif sumber dana dari pinjaman dari bank lokal maupun bank asing, sebagai agen bank atas pendanaan portofolio piutang dan penerbitan saham.

Lindung nilai posisi mata uang asing

Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai terhadap semua posisi mata uang asing untuk menghindari risiko fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah baik secara natural maupun melakukan kontrak lindung nilai dengan pihak ketiga.

- Pengelolaan ketidaksesuaian suku bunga

Dalam mengantisipasi ketidaksesuaian suku bunga piutang dan suku bunga pinjaman yang diterima, Perusahaan menerapkan kebijakan pembatasan selisih maksimum (maximum gap) antara suku bunga tetap yang diberikan kepada debitur dengan pinjaman bunga tetap tidak melebihi jumlah Ekuitas.

- Pengelolaan risiko likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan menggunakan sumber dana jangka panjang untuk membiayai piutang jangka panjangnya. Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan sejumlah bank lokal maupun bank asing untuk penyediaan sumber dana jangka panjang, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, guna memperkuat struktur pendanaan.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Perusahaan mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, Perusahaan juga telah memiliki pengendalian intern yang kuat, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

Berikut adalah ekposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020:

	30 September 2021			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Jumlah
Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan setara kas dan penempatan				
di bank	537,813,214	-	-	537,813,214
Piutang sewa pembiayaan - bersih	640,212,617	-	25,761,968	665,974,585
Piutang pembiayaan multiguna - bersih	21,641,076	-	170,970	21,812,046
Piutang lain-lain	952,839	-	-	952,839
Aset lain-lain	71,075,399	<u> </u>		1,075,399
Jumlah	1,271,695,145	-	25,932,938	1,227,628,083
		31 Desen	nber 2020	
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Jumlah
Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan setara kas dan penempatan				
di bank	252,922,291	-	-	252,922,291
Piutang sewa pembiayaan - bersih	553,743,269	-	106,124,469	659,867,738
Piutang pembiayaan multiguna - bersih	3,090,549	-	2,373,742	5,464,291
Piutang lain-lain	2,523,251	-	-	2,523,251
Aset lain-lain	350,216	-		350,216
Jumlah	812,629,576	-		921,127,787

Dampak pandemic COVID-19

Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Hal ini berdampak pada kinerja para debitur Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang terkait program restrukturisasi konsumen terdampak COVID-19, yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja Perusahaan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Perusahaan telah melaksanakan Peraturan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi para debitur dan menganalisis risiko yang dihadapi.

Manajemen melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak pandemi terhadap bisnis Perusahaan sebagai berikut :

- 1. Memberikan restrukturisasi skedul pembayaran untuk debitur yang terdampak sesuai peraturan
- 2. Melakukan penyaluran kredit secara lebih selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- 3. Menyelesaikan kredit-kredit bermasalah sesuai peraturan yang berlaku.
- 4. Menerapkan manajemen risiko secara optimal khususnya risiko operasional dan risiko likuiditas Perusahaan.
- 5. Melakukan Tindakan preventif dan deteksi dini bagi setiap karyawan untuk meminimalisir terpapar atau penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, manajemen telah memperhitungkan kondisi masa depan dengan mempertimbangkan berbagai Informasi relevan yang ada.

Dalam kondisi normal, restrukturisasi pinjaman menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan pindah ke stage 2. Namun, dalam kondisi saat ini dan sejalan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, manajemen telah mempertimbangkan bahwa restrukturisasi mungkin tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan jika debitur diharapkan dapat memulihkan dan memenuhi kewajiban kontraktual mereka setelah akhir periode relaksasi.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak pandemic COVID-19 terhadap perhitungan kerugian kredit ekpektasian dengan melakukan penyesuaian antara lain melakukan perubahan terhadap variable ekonomi makro dan melakukan perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara lifetime untuk debitur restrukturisasi tertentu yang terdampak COVID-19 dimana mempengaruhi nilai kerugian ekpektasian yang diakui dalam laporan keuangan secara waiar.

Jumlah piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan multiguna, dan Aset IMBT yang telah di restrukturisasi sampai dengan tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing berjumlah Rp 250.064.001 dan Rp 357.333.588.

c. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang pembiayaan investasi dan surat utang jangka menengah, pinjaman diterima, dan liabilitas lain-lain.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, jika mata uang melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 420.724 dan Rp 926.568, terutama diakibatkan keuntungan/(kerugian) dari penjabaran aset keuangan, serta keuntungan/(kerugian) penjabaran pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

d. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman yang diterima.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya pinjaman diterima (pinjaman dengan suku bunga mengambang) Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

	30 September 2021					
	Suk	ku bunga mengambang/	1	Jumlah/		
	Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	Lebih dari 1 - 2 tahun	Lebih dari 2 tahun			
Liabilitas Pinjaman yang diterima		286,140,000		286,140,000		
		31 Desemb	er 2020			
	Suk	ku bunga mengambang/		Jumlah/		
	Kurang dari					
	atau sama dengan 1 tahun	Lebih dari 1 - 2 tahun	Lebih dari 2 tahun			
Liabilitas Pinjaman yang diterima	-	282,100,000	_	282,100,000		

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, jika suku bunga atas pinjaman yang didenominasikan dalam Rupiah lebih tinggi/rendah 1% dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk periode/tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp 2.146.050 dan Rp 4.401.769, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Untuk mengurangi risiko pendanaan, Perusahaan mendiversifikasi sumber dana. Selain dari modal sendiri dan penerimaan angsuran pelanggan, Perusahaan memperoleh sumber dana dari pinjaman bank.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan (tidak termasuk beban bunga pinjaman masa depan):

	30 September 2021					
	<= 1 tahun	1-2 tahun	3-5 tahun	Jumlah	Biaya transaksi	Nilai Tercatat
Liabilitas						
Pinjaman yang diterima Beban akrual	39,837,760 2,145,597	301,014,575	231,241	341,083,576 2,145,597	205,106	340,878,470 2,145,597
Liabilitas lain-lain	24,736,755	<u> </u>	- .	24,736,755		24,736,755
Jumlah	66,720,112	301,014,575	231,241	367,965,928	205,106	367,760,822
	31 Desember 2020					
	<= 1 tahun	1-2 tahun	3-5 tahun	Jumlah	Biaya transaksi	Nilai Tercatat
Liabilitas						
Pinjaman yang diterima Surat utang jangka	292,899,667	226,605,639	44,823,891	564,329,197	660,796	563,668,401
menengah	35,262,415	-	-	35,262,415	15,556	35,246,859
Beban akrual	1,568,956	-	-	1,568,956		1,568,956
Liabilitas lain-lain	45,707,224	18,132,825	16,972,366	80,812,415		80,812,415
Jumlah	375,438,262	244,738,464	61,796,257	681,972,983	676,352	681,296,631

f. Risiko Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan menghadapi risiko kelalaian penerapan standar operasional dan prosedur maupun pengendalian yang tidak menunjang pertumbuhan Perusahaan, terutama dalam menganalisa kelayakan pembiayaan dan pengawasan terhadap penagihan piutang. Hal ini dapat mempengaruhi proses transaksi usaha dan akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan tingkat layanan kepada pelanggan dan pemasok, yang mempengaruhi kinerja dan daya saing Perusahaan.

Untuk meminimalisasi risiko operasional diatas, manajemen menekankan perlunya pemahaman setiap karyawan terhadap Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan kebijakan kredit yang berlaku dengan melakukan pelatihan on the job yang memadai bagi setiap karyawan baru maupun seluruh karyawan disamping perlunya peran internal kontrol / internal audit Perusahaan untuk mendeteksi dan menganalisa setiap penyimpangan yang timbul agar tindakan perbaikan dan pengecekan dapat dilakukan. Menyadari pentingnya setiap karyawan berpartisipasi dalam pelaksanaan SOP dan kebijakan Perusahaan, manajemen memasukkan unsur ketaatan SOP dan kebijakan tersebut dalam sistem penilaian kinerja karyawan.

33. Ikatan dan Perjanjian Penting

- a. Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan menerima fasilitas Cross Currency Swap (CCS) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US\$ 10.000.000 untuk hedging atas eksposur mata uang asing dan suku bunga dari surat utang jangka menengah (MTN) yang diterbitkan Perusahaan (Catatan 13). Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 36 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan penempatan di bank sebesar Rp 2.000.000 (Catatan 4). Penempatan dan penjaminan ini telah dibebaskan sejak 10 Juni 2021.
- b. Pada tanggal 10 Mei 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan PT Verena Multi Finance Tbk (Verena). Para pihak setuju bahwa maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberi fasilitas pembiyaan kepada *lessee* yang direkomendasikan oleh Perusahaan dimana dana pembiayaan 90% berasal dari Verena.

Verena menyediakan fasilitas pembiayaan yang akan disalurkan kepada *lessee* melalui Perusahaan selaku agen dan kuasa dari Verena sebesar Rp 24.000.000 sampai dengan jumlah keseluruhan sebesar batas maksimum sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Fasilitas pembiayaan ini bersifat *revolving* dan diberikan kepada *lessee* untuk tujuan perolehan barang modal.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah terhitung sejak tanggal ditandatangani dan telah jatuh tempo pada tanggal 29 April 2020. Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi pada tanggal jatuh tempo.

Tingkat bunga minimal yang diberlakukan terhadap setiap fasilitas pembiayaan adalah sebesar 10,82% per tahun. Tingkat bunga tersebut bersifat tetap selama jangka waktu perjanjian pembiayaan.

c. Perjanjian Sewa - Perusahaan sebagai Lessee

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sewa ruang kantor: Periode sewa berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Perjanjian sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian ke harga pasar kini.

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Tifa Arum Realty	Sewa ruang kantor Jakarta	13 Juni 2019 – 12 Juni 2020 diperpanjang 13 Juni 2020 – 12 Mei 2021
	Sewa ruang kantor Surabaya	1 September 2016 – 31 December 2021
Pihak ketiga		
Hotel Gran Senyiur	Sewa ruang kantor Balikpapan	20 Oktober 2019 – 20 Oktober 2020 diperpanjang sampai dengan 19 Oktober 2022
Grand Clarion Hotel & Convention	Sewa ruang kantor Makassar	15 Juni 2019 – 15 Juni 2020 diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2023
PT Surya Dumai Industri Tbk	Sewa ruang kantor Pekanbaru/	1 Juli 2019 – 30 Juni 2020 diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2022
PT Proline Finance Indonesia	Sewa ruang kantor Jakarta	1 April 2021 - 31 Maret 2026

34. Informasi Segmen

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas lokasi sumber daya ke masing-masing segmen tersebut. Perusahaan memiliki empat (4) segmen yang dilaporkan meliputi sewa pembiayaan, pembiayaan multiguna, anjak piutang, dan sewa operasi.

Segmen Usaha

	30 September 2021					
-	Sewa	Sewa Pembiayaan Pembiay				
_	Pembiayaan	Multiguna	Anjak Piutang	Sewa Operasi	Syariah	Jumlah
Pendapatan usaha Pendapatan yang tidak dialokasikan Jumlah pendapatan	69,429,117	1,452,148	-	-	7,602,040	78,483,305 3,458,645 81,941,950
Beban bunga dan bagi hasil Beban yang tidak dialokasikan Beban pajak Laba tahun berjalan	(19,236,968)				(355,908)	(19,592,876) (41,121,993) (4,768,075) 16,459,006
Aset Segmen Aset yang tidak dialokasikan Jumlah aset segmen*	665,974,587	21,812,046	-	-	66,301,678	754,088,311 690,582,844 1,444,671,155
Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak dialokasikan Jumlah liabilitas	340,878,469	-	-	-	-	340,878,469 80,985,029
segmen*						421,863,498

Aset segmen tidak termasuk pajak dibayar dimuka dan aset/utang pajak tangguhan, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak

	31 Desember 2020					
	Pembiayaan					
	Sewa Pembiayaan	Multiguna	Anjak Piutang	Sewa Operasi	Syariah	Jumlah
Pendapatan usaha Pendapatan yang tidak	132,804,370	1,730,600	-	-	14,796,499	149,331,469
dialokasikan Jumlah pendapatan						9,558,518 158,889,987
Beban bunga dan bagi hasil Beban yang tidak	(55,806,209)				(4,755,836)	(60,562,045)
dialokasikan Beban pajak						(73,813,148) (9,629,424)
Laba tahun berjalan						14,885,370
Aset Segmen Aset yang tidak	659,867,738	5,464,291	-	-	146,066,070	811,398,099
dialokasikan						292,327,150
Jumlah aset segmen*						1,103,725,249
Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak	593,509,666				71,162,445	664,672,111
dialokasikan Jumlah liabilitas						67,817,363
segmen*						732,489,474

^{*} Aset segmen tidak termasuk pajak dibayar dimuka dan aset pajak tangguhan, sedangkan liabilitas segmen tidak termasuk utang pajak

35. Aset dan Liabilitas Moneter Bersih dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		30 September 2021		31 Desember 2020	
		Ekuivalen Rp/			Ekuivalen Rp/
		Mata uang asing/	Equivalent in	Mata uang asing/	Equivalent in
		Original currency	Rp	Original currency	Rp
Aset					
Kas dan setara kas dan penempatan					
di bank(Catatan 4)	USD	14,624,438	209,231,836	17,376,487	245,095,348
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 5)	USD	5,752,573	82,302,065	5,901,436	83,239,755
Jumlah Aset			291,533,901		328,335,103
Liabilitas					
Pinjaman diterima (Catatan 15)	USD	20,000,000	286,140,000	20,000,000	282,100,000
Surat utang jangka menengah					
(Catatan 13)	USD	-		2,498,891	35,262,415
Jumlah Liabilitas			286,140,000		317,362,415
Aset - bersih			5,393,901		10,972,688

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, kurs konversi yang digunakan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

36. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri pembiayaan, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perusahaan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perusahaan.

37. Informasi Lainnya

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan telah menghitung beberapa rasio sesuai dengan peraturan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (tidak diaudit) sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember 2020
Rasio permodalan Rasio Non Performing Financing	158.23%	58.64%
Bruto	5.06%	4.99%
Bersih	2.51%	3.42%
Imbal hasil aset	1.67%	2.12%
Return of Equity (ROE)	2.37%	4.05%
Beban operasional terhadap pendapatan		
operasional	74.09%	84.29%
Gearing Ratio	33.33%	94.74%
Rasio piutang sewa pembiayaan neto		
terhadap total aset	52.20%	73.51%
Rasio modal sendiri terhadap modal		
disetor	134.59%	307.40%
Rasio saldo piutang sewa pembiayaan		
neto terhadap total pinjaman	221.22%	143.95%
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo		
piutang pembiayaan	91.04%	81.65%

38. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan serta berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- PSAK No. 73, Sewa

Penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73

Perusahaan menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Atas penerapan PSAK 71, Perusahaan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba sebagai berikut:

	Saldo laba belum ditentukan pengunaannya
Saldo 31 Desember 2019	251,508,643
Penyesuaian saldo atas penerapan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
awal PSAK No. 71:	
Piutang sewa pembiayaan:	
Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai	(20,627,244)
Piutang pembiayaan multiguna	
Penurunan cadangan kerugian penurunan nilai	166,752
	(20,460,492)
Saldo 1 Januari 2020 setelah penyesuaian	
PSAK No. 71	231,048,151

Tabel berikut menunjukkan saldo beberapa pos-pos laporan posisi keuangan untuk saldo awal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73:

	Saldo 31 Desember 2019	Penyesuaian PSAK 71	Penyesuaian PSAK 73	Saldo 1 Januari 2020
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Aset Piutang sewa pembiayaan Piutang pembiayaan multiguna Biaya dibayar dimuka	942,844,995 9,642,291 536,896	(20,627,244) 166,752 -	(342,067)	922,217,751 9,809,043 194,829
Aset tetap	9,230,424 962,254,606	(20,460,492)	2,119,782 1,777,715	11,350,206 943,571,829
Liabilitas Liabilitas sewa			2,119,782	2,119,782
Ekuitas Saldo laba belum ditentukan pengunaannya	251,508,643	(20,460,492)	<u>-</u>	231,048,151

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Perusahaan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.e, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

Kategori klasifikasi awal sesuai dengan PSAK No. 55 dan kategori klasifikasi baru berdasarkan PSAK No. 71 untuk aset keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Tidak terdapat perubahan pada nilai tercatat bruto aset keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020 terkait dengan adopsi klasifikasi baru berdasarkan PSAK No. 71.

Karena PSAK No. 71 mempertahankan hampir semua ketentuan klasifikasi liabilitas keuangan PSAK No. 55, tidak ada perubahan dalam klasifikasi liabilitas keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 71.

Cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dihitung kembali sesuai dengan ketentuan transisisi PSAK No. 71 pada tanggal 1 Januari 2020 dan perbedaan yang dihasilkan sebesar Rp 20.460.492 didebitkan ke saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 9,45% per tahun. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020, aset tetap Perusahaan meningkat sebesar Rp 2.119.782 yang terdiri dari reklasifikasi biaya dibayar dimuka sebesar Rp 342.067 dari pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 1.777.715. Selain itu, liabilitas sewa Perusahaan meningkat sebesar Rp 2.119.782 yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa untuk kontrak sewa yang sebelumnya dicatat sebagai sewa operasi.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK No. 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK No. 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	2,375,057	
Didiskontolan dengan menggunakan	2,010,001	
suku bunga inkremental Perusahaan	2,238,399	
Dikurangi:		
Sewa jangka pendek	(118,617)	
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada		
1 Januari 2020	2,119,782	

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.
- liabilitias sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.
- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.
- menggunakan tinjauan ke belakang (hindsight) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.
- menerapkan pengecualian untuk sewa dengan aset yang bernilai rendah.